



JURNAL BASICEDU

Volume 10 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 584 - 594

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Integrasi Pendidikan Nilai dalam PPKn Melalui Model Value Clarification Technique (VCT) untuk Mengatasi Krisis Moral Digital pada Peserta Didik

Suratih Muhamad Karo¹, Juliana Rohima Putri^{2✉}

Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: suratihmuhamad.2024@student.uny.ac.id¹, juliana0011fishipol.2024@student.uny.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan kewarganegaraan, khususnya berupa krisis moral digital yang ditandai oleh maraknya misinformasi, disinformasi, dan polarisasi nilai di ruang publik digital. Kondisi ini semakin diperkuat oleh dinamika era post-truth, ketika emosi dan opini personal lebih dominan dibandingkan fakta objektif, sehingga berdampak pada pembentukan karakter dan orientasi nilai peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui model Value Clarification Technique (VCT) sebagai strategi untuk mengatasi krisis moral digital pada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran sistematis terhadap buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui proses klasifikasi, perbandingan, dan sintesis konseptual terhadap temuan-temuan literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis moral digital berdampak pada melemahnya etika komunikasi, kualitas partisipasi kewarganegaraan, dan kohesi sosial di ruang publik digital, terutama di kalangan generasi muda. Pembahasan menegaskan bahwa Value Clarification Technique (VCT) memiliki potensi strategis dalam pembelajaran PPKn karena mendorong proses klarifikasi nilai, refleksi moral, dan pengambilan keputusan etis yang kontekstual dengan isu-isu digital. Integrasi VCT dalam PPKn berkontribusi pada penguatan literasi moral digital peserta didik, yaitu kemampuan memahami, menilai, dan menginternalisasi nilai moral dalam praktik kehidupan digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan desain pembelajaran PPKn berbasis VCT sebagai pendekatan pendidikan nilai yang adaptif terhadap tantangan moral di era post-truth.

Kata kunci: pendidikan nilai; PPKn; Value Clarification Technique; krisis moral digital; era post-truth

Abstract

The development of digital technology and social media has presented new challenges in civic life, especially in the form of a digital moral crisis marked by the rise of misinformation, disinformation, and polarization of values in the digital public space. This condition is further strengthened by the dynamics of the post-truth era, when emotions and personal opinions are more dominant than objective facts, thus having an impact on the formation of character and value orientation of students. This study aims to examine conceptually the integration of value education in the learning of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) through the Value Clarification Technique (VCT) model as a strategy to overcome the digital moral crisis in students. This study uses a descriptive qualitative approach with a library research method through a systematic search of books, national and international journal articles, and relevant policy documents. Data analysis was carried out through the process of classification, comparison, and conceptual synthesis of literature findings. The results of the study show that the digital moral crisis has an impact on the weakening of communication ethics, the quality of civic participation, and social cohesion in the digital public space, especially among the younger generation. The discussion emphasized that the Value Clarification Technique (VCT) has strategic potential in PPKn learning because it encourages the process of value clarification, moral reflection, and ethical decision-making that is contextual with digital issues. The integration of VCT in PPKn contributes to strengthening students' digital moral literacy, namely the ability to understand, assess, and internalize moral values in digital life practices. This study recommends strengthening the VCT-based PPKn learning design as an adaptive value education approach to moral challenges in the post-truth era.

Keywords: value education; PPKn; Technical Value Clarification; digital moral crisis; post-Truth Era

Copyright (c) 2026 Suratih Muhamad Karo, Juliana Rohima Putri

✉ Corresponding author :

Email : juliana0011fishipol.2024@student.uny.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i2.10482>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 10 No 2 Tahun 2026
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola komunikasi dan akses informasi dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan masif, namun pada saat yang sama membuka ruang luas bagi beredarnya konten yang tidak terverifikasi, seperti hoaks, ujaran kebencian, serta narasi manipulatif yang mengeksploitasi emosi publik (Barzilai & Chinn, 2020a). Kondisi ini berdampak langsung pada peserta didik yang tumbuh dan berinteraksi di tengah arus informasi tanpa batas, sehingga berpotensi memengaruhi pembentukan karakter, orientasi nilai, serta cara mereka memaknai kebenaran di ruang digital (Rahmat, 2023). Fenomena tersebut menandai munculnya krisis moral digital, yakni melemahnya kesadaran etis dan tanggung jawab dalam berinteraksi serta berpartisipasi di ruang publik digital.

Krisis moral digital semakin menguat dalam konteks era post-truth, yaitu situasi ketika emosi, keyakinan personal, dan afiliasi kelompok lebih berpengaruh dalam membentuk opini dibandingkan fakta objektif (Oxford English, n.d.). Dalam kondisi ini, informasi yang tidak akurat, rumor, dan teori konspirasi cenderung diterima dan disebarluaskan tanpa proses verifikasi yang memadai. Barzilai & Chinn, (2020) menjelaskan bahwa era post-truth mencerminkan menurunnya kepedulian terhadap kebenaran, yang berdampak pada melemahnya kemampuan warga negara dalam mengambil keputusan rasional di ranah sosial, politik, dan ekonomi. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah meningkatnya polarisasi wacana dan kesalahpahaman sosial, termasuk di kalangan peserta didik yang masih berada pada fase pembentukan nilai dan identitas kewarganegaraan (Wijaya, 2020).

Dalam konteks Indonesia, tantangan krisis moral digital menjadi semakin kompleks mengingat karakter masyarakat yang plural dari segi etnis, budaya, agama, dan pandangan politik. Keberagaman yang seharusnya menjadi modal sosial justru berpotensi memicu konflik apabila tidak diiringi dengan kesadaran moral dan etika digital yang memadai. Data nasional menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 3,5 dari skala 5 (Isabella et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara percepatan transformasi digital dan kesiapan moral warga negara, khususnya peserta didik, dalam memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai kewarganegaraan.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut, terutama melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara normatif, PPKn berfungsi menanamkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan sebagai fondasi pembentukan warga negara yang berkarakter (Rokhmanuk & Goncharenko, 2023). Namun demikian, dalam praktik kurikulum, integrasi nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam konteks kehidupan digital masih belum tergarap secara optimal. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan etika publik umumnya diajarkan dalam konteks kehidupan sosial konvensional, sementara tantangan moral di ruang digital seperti etika bermedia, verifikasi informasi, dan tanggung jawab digital belum terintegrasi secara sistematis dalam pembelajaran PPKn. Kesenjangan integrasi nilai digital dalam kurikulum PPKn ini menyebabkan peserta didik belum sepenuhnya dibekali kemampuan reflektif untuk menghadapi dinamika moral di era post-truth.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Value Clarification Technique (VCT) merupakan model pembelajaran yang efektif dalam menanamkan kesadaran nilai melalui proses memilih, menghargai, dan mengimplementasikan nilai secara sadar. Benaziria, (2018) menemukan bahwa VCT berkontribusi dalam penguatan literasi digital warga negara muda melalui pembelajaran PPKn. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa VCT efektif dalam meningkatkan kesadaran moral dan sikap demokratis peserta didik melalui diskusi nilai dan dilema moral. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memosisikan VCT sebagai strategi pendidikan nilai secara umum dan belum secara eksplisit diarahkan untuk menjawab kesenjangan integrasi nilai digital dalam kurikulum PPKn, khususnya dalam konteks krisis moral digital dan tantangan era post-truth.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kerangka konseptual integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran PPKn melalui model Value Clarification Technique (VCT) yang diarahkan secara spesifik untuk memperkuat integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks kehidupan digital. Pendekatan ini menekankan pembentukan literasi moral digital, yaitu kemampuan peserta didik untuk memahami, mengklarifikasi, dan menginternalisasi nilai moral dalam praktik penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual bagaimana integrasi pendidikan nilai melalui model VCT dalam pembelajaran PPKn dapat menjadi strategi yang relevan dan adaptif dalam mengatasi krisis moral digital pada peserta didik di era post-truth.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan membangun kerangka konseptual mengenai integrasi pendidikan nilai dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai respons terhadap krisis moral digital di era *post-truth*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis dan sintesis teoritis terhadap berbagai temuan ilmiah yang relevan dengan isu pendidikan nilai, moral digital, dan kewarganegaraan. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data akademik utama, antara lain Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi: *pendidikan nilai*, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *Value Clarification Technique (VCT)*, *krisis moral digital*, *literasi moral digital*, dan *post-truth*, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Penelusuran dilakukan secara berulang untuk memastikan kelengkapan dan keterwakilan sumber.

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) relevansi substansi dengan fokus kajian pendidikan nilai dan PPKn, (2) kualitas sumber yang ditunjukkan melalui akreditasi jurnal atau reputasi penerbit, serta (3) keterbaruan publikasi dengan prioritas literatur terbitan tahun 2018–2025, meskipun beberapa teori klasik tetap digunakan sebagai landasan konseptual dan argumentatif. Adapun kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak memiliki kejelasan metodologis, bersifat populer non-akademik, atau tidak secara langsung berkaitan dengan konteks pendidikan dan kewarganegaraan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) identifikasi dan seleksi literatur, (2) klasifikasi dan pemetaan gagasan sesuai dengan tema penelitian, (3) perbandingan argumen dan temuan antar-literatur, serta (4) sintesis konseptual untuk merumuskan strategi integrasi pendidikan nilai melalui model VCT dalam pembelajaran PPKn. Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai pandangan dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan. Selain itu, proses penelusuran dan analisis dilakukan secara berulang (*iterative review*) guna memastikan konsistensi interpretasi dan ketepatan sintesis konsep. Melalui prosedur ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi konseptual yang komprehensif dan memperkaya diskursus akademik mengenai pendidikan kewarganegaraan di era digital dan *post-truth*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Krisis Moral Digital di Ruang Publik Indonesia

Perkembangan ruang publik digital di Indonesia ditandai oleh meningkatnya paparan misinformasi dan disinformasi yang beredar melalui berbagai platform media sosial. Berbagai laporan menunjukkan bahwa media sosial menjadi saluran utama penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, termasuk hoaks, ujaran kebencian, serta konten manipulatif yang memanfaatkan emosi pengguna untuk membentuk opini tertentu (Allcott & Gentzkow, 2017). Kondisi ini diperkuat oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat yang masih berada pada kategori sedang, sehingga kemampuan pengguna dalam memilah dan mengevaluasi kebenaran informasi menjadi terbatas (Rizki et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, paparan informasi yang tidak akurat turut mempengaruhi kualitas interaksi di ruang publik digital, yang tercermin dari maraknya konflik wacana dan

penyebaran stigma (Barzilai & Chinn, 2020). Selain itu, kondisi tersebut berkontribusi pada normalisasi perilaku komunikasi yang mengabaikan etika serta tanggung jawab sosial dalam ruang publik digital (Ghosh, 2022).

Temuan ini menunjukkan bahwa krisis moral digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologis, tetapi juga tampak dalam pola komunikasi warga negara di ruang publik digital yang semakin rentan terhadap distorsi informasi. Selain maraknya hoaks, ruang publik digital di Indonesia juga diwarnai oleh praktik disinformasi yang diproduksi secara lebih terstruktur dan disengaja untuk memengaruhi persepsi publik, terutama dalam isu politik, sosial, dan identitas kelompok. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa mekanisme algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang bersifat sensasional dan emosional (Tobergte & Curtis, 2013). Kondisi ini menyebabkan narasi yang menyesatkan memiliki peluang lebih besar untuk tersebar luas dibandingkan dengan informasi yang bersifat faktual (Ghosh, 2022). Pola ini mendorong menguatnya polarisasi wacana di ruang publik digital, yang ditandai oleh meningkatnya pertukaran opini yang provokatif serta melemahnya kualitas dialog antar pengguna (Khairunisa et al., 2024). Dengan demikian, disinformasi di media sosial tidak hanya hadir sebagai konten yang keliru, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika komunikasi digital yang membentuk iklim ruang publik yang semakin terfragmentasi.

Intensitas paparan informasi di media sosial juga menunjukkan pola konsumsi informasi yang semakin cepat dan berulang, terutama melalui platform berbasis visual dan pesan singkat. Karakteristik media sosial yang menekankan kecepatan, popularitas, dan keterlibatan pengguna menyebabkan konten dengan muatan emosional lebih mudah mendapatkan perhatian dibandingkan informasi yang berbasis fakta dan argumentasi rasional (Allcott & Gentzkow, 2017). Kondisi ini mendorong terbentuknya ruang gema (*echo chamber*), yaitu situasi ketika pengguna lebih sering terpapar pada informasi yang sejalan dengan preferensi dan keyakinan sebelumnya (Ghosh, 2022). Akibatnya, sudut pandang pengguna menjadi semakin terbatas dan polarisasi wacana di ruang publik digital cenderung semakin menguat (Nally, 2023).

Selain itu, generasi muda, termasuk peserta didik, merupakan kelompok yang paling intens berinteraksi dengan ruang digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peserta didik tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif yang memproduksi dan mendistribusikan konten digital melalui berbagai platform daring. Namun, intensitas keterlibatan tersebut sering kali belum diimbangi dengan kemampuan literasi moral dan etika digital yang memadai, terutama dalam memahami implikasi nilai, tanggung jawab, serta risiko sosial dari aktivitas digital yang mereka lakukan (Livingstone et al., 2019).

Paparan berulang terhadap konten negatif, ujaran kebencian, dan informasi menyesatkan berpotensi membentuk pola komunikasi digital yang permisif terhadap perilaku tidak etis dan menurunkan sensitivitas moral dalam berinteraksi di ruang publik daring. Dalam jangka panjang, kecenderungan ini tidak hanya memengaruhi perilaku peserta didik di ruang digital, tetapi juga tercermin dalam interaksi sosial mereka di kehidupan sehari-hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis moral digital di ruang publik Indonesia turut termanifestasi dalam pola perilaku dan partisipasi generasi muda sebagai warga negara digital, sehingga memperkuat urgensi penguatan pendidikan nilai yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika digital (Khasanah, 2017).

Dampak Krisis Moral Digital terhadap Kehidupan Kewarganegaraan

Krisis moral digital yang berkembang di ruang publik Indonesia berdampak langsung pada kualitas kehidupan kewarganegaraan, khususnya dalam pola interaksi sosial dan partisipasi warga negara di ruang digital. Paparan informasi menyesatkan di media sosial terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi sosial dan melemahnya kualitas diskursus publik, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai penyebaran informasi palsu di ruang digital politik (Allcott & Gentzkow, 2017). Selain itu, penggunaan narasi provokatif dan emosional dalam konten digital juga memperkuat fragmentasi sosial dan menurunkan kepercayaan antar warga negara, terutama dalam isu-isu publik yang sensitif (Ghosh, 2022). Kondisi tersebut mendorong pola interaksi kewarganegaraan yang semakin reaktif dan emosional, sehingga menghambat terbentuknya ruang

publik digital yang inklusif dan deliberatif (Barzilai & Chinn, 2020a). Dalam konteks kewarganegaraan, fenomena ini mencerminkan pergeseran partisipasi digital dari orientasi kepentingan bersama menuju ekspresi kepentingan kelompok yang lebih sempit, yang pada akhirnya melemahkan kohesi sosial dan etika dialog publik. Dampak krisis moral digital juga tampak pada perubahan pola partisipasi warga negara di ruang digital, khususnya dalam keterlibatan terhadap isu-isu publik.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa partisipasi kewarganegaraan di media sosial cenderung bergeser dari partisipasi deliberatif menuju ekspresi yang bersifat simbolik dan reaktif, seperti penyebaran ulang konten tanpa verifikasi serta keterlibatan dalam perdebatan berbasis emosi (Ghosh, 2022). Pergeseran ini diperkuat oleh kondisi era post-truth, di mana emosi dan afiliasi kelompok lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional dalam merespons informasi publik (Nally, 2023). Dalam konteks generasi muda, laporan *Indeks Literasi Digital Indonesia* menunjukkan bahwa kemampuan kritis dalam menilai dan memverifikasi informasi digital masih belum merata, sehingga peserta didik dan pemuda rentan terpapar narasi yang menyederhanakan persoalan kewarganegaraan (Rizki et al., 2021). Temuan lain mengenai transformasi media sosial pada Generasi Z juga mengungkapkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola partisipasi politik dan sosial yang lebih ekspresif, namun sering kali tidak diiringi dengan pendalaman substansi isu dan tanggung jawab kewarganegaraan (Karo & Afriani, 2024).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis moral digital tidak hanya berdampak pada kualitas komunikasi, tetapi juga pada cara warga negara terutama generasi muda memaknai peran dan partisipasinya dalam kehidupan kewarganegaraan di ruang publik digital. Selain memengaruhi pola partisipasi digital, krisis moral digital juga berdampak pada melemahnya kohesi sosial di ruang publik digital. Kajian tentang komunikasi politik digital menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap narasi provokatif dan disinformasi berkontribusi pada meningkatnya fragmentasi sosial serta menurunnya kepercayaan antar warga dalam interaksi daring (Ghosh, 2022). Temuan lain mengungkapkan bahwa lingkungan media digital yang sarat konflik wacana cenderung mendorong terbentuknya kelompok diskursif yang eksklusif, sehingga ruang publik digital menjadi terpolarisasi dan kurang mendukung dialog lintas pandangan (Nally, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis moral digital tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas relasi sosial warga negara di ruang publik digital.

Dampak berikutnya tampak pada normalisasi perilaku komunikasi digital yang mengabaikan etika kewarganegaraan. Studi mengenai keadaban digital di Indonesia menunjukkan bahwa praktik seperti penyebaran ulang informasi tanpa verifikasi, penggunaan bahasa agresif, serta penghakiman sosial semakin sering dianggap sebagai bagian wajar dari interaksi daring (Khairunisa et al., 2024). Sementara itu, penelitian mutakhir tentang transformasi media sosial pada generasi muda mengungkapkan bahwa intensitas penggunaan media sosial berkorelasi dengan kecenderungan komunikasi instan dan emosional dalam merespons isu publik, tanpa pendalaman substansi kewarganegaraan (Karo & Afriani, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa krisis moral digital berdampak pada pembentukan pola komunikasi dan orientasi kewarganegaraan generasi muda di ruang publik digital.

Pembahasan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Basis Pendidikan Nilai di Era Post-Truth

Temuan mengenai krisis moral digital di ruang publik Indonesia menunjukkan bahwa tantangan kewarganegaraan di era post-truth tidak hanya berkaitan dengan penyebaran misinformasi dan disinformasi, tetapi juga dengan melemahnya kemampuan warga negara, khususnya peserta didik, dalam menilai dan memaknai nilai moral secara reflektif. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis sebagai wahana pendidikan nilai yang berfungsi membentuk kesadaran etis, sikap kritis, serta tanggung jawab kewarganegaraan peserta didik dalam menghadapi dinamika kehidupan digital. Rokhmanuk & Goncharenko, (2023) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi partisipasi warga negara. Pandangan

tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengarahkan pembelajaran PPKn agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu merespons tantangan era post-truth melalui penguatan proses refleksi nilai. Oleh karena itu, PPKn perlu didukung oleh model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengklarifikasi, menimbang, dan menginternalisasi nilai secara sadar, sehingga pendidikan nilai tidak berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan terwujud dalam sikap dan perilaku kewarganegaraan di ruang digital.

Meskipun secara normatif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki mandat kuat dalam pembentukan karakter dan nilai kewarganegaraan, praktik pembelajaran di satuan pendidikan masih menghadapi keterbatasan dalam merespons tantangan moral di ruang digital. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn cenderung menempatkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks kehidupan sosial konvensional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan dinamika interaksi digital yang dihadapi peserta didik sehari-hari. Khairunisa et al., (2024) menegaskan bahwa lemahnya integrasi dimensi etika digital dalam pendidikan kewarganegaraan menyebabkan peserta didik kurang dibekali kemampuan reflektif dalam menyikapi informasi di media sosial. Temuan serupa juga disampaikan oleh Amir et al., (2025) yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di era post-truth menghadapi tantangan serius dalam menanamkan ketahanan informasi dan tanggung jawab digital warga negara muda. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif PPKn dan realitas praktik pembelajaran, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan nilai yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan digital peserta didik.

Kesenjangan antara tuntutan pendidikan nilai di era digital dan praktik pembelajaran PPKn menunjukkan perlunya pendekatan pedagogis yang tidak hanya bersifat transmisi nilai, tetapi juga mendorong proses refleksi dan pengambilan keputusan moral peserta didik. Dalam konteks era post-truth, peserta didik dihadapkan pada situasi yang menuntut kemampuan untuk menilai kebenaran, mempertimbangkan implikasi moral, serta menentukan sikap secara sadar di tengah arus informasi yang saling bertentangan. Nally, (2023) menegaskan bahwa pendidikan di era post-truth perlu diarahkan pada penguatan kapasitas reflektif peserta didik agar mampu menghadapi distorsi informasi dan tekanan emosional dalam ruang publik digital. Pandangan tersebut sejalan dengan Ghosh, (2022) yang menyatakan bahwa melemahnya rasionalitas publik menuntut pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kemampuan evaluatif dan penalaran moral warga negara sejak dini. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn memerlukan model pendidikan nilai yang secara sistematis memberi ruang bagi peserta didik untuk mengklarifikasi nilai, menimbang berbagai alternatif sikap, dan memahami konsekuensi moral dari pilihan yang diambil dalam konteks kehidupan digital.

Salah satu model pembelajaran yang relevan untuk menjawab kebutuhan refleksi nilai dalam pembelajaran PPKn di era post-truth adalah Value Clarification Technique (VCT). Model ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan nilai melalui tahapan memilih, menghargai, dan mengimplementasikan nilai secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. Hidayati & Minsih, (2023) menjelaskan bahwa VCT efektif dalam membentuk karakter peserta didik karena mendorong keterlibatan emosional dan rasional secara seimbang dalam proses pengambilan keputusan moral. Temuan ini diperkuat oleh Hatmono et al., (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan VCT dalam pembelajaran kewarganegaraan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman nilai multikultural dan sikap toleran peserta didik. Dalam konteks tantangan moral digital, karakteristik VCT yang menekankan proses refleksi nilai dan dialog terbuka menjadi relevan untuk membantu peserta didik menyikapi informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab.

Urgensi integrasi Value Clarification Technique (VCT) dalam pembelajaran PPKn semakin menguat ketika pendidikan kewarganegaraan dihadapkan pada realitas ruang publik digital yang sarat dengan misinformasi, disinformasi, dan polarisasi nilai. Pendidikan nilai yang bersifat deklaratif dan normatif tidak lagi memadai untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kompleksitas moral di era post-truth. Karo & Afriani, (2024) menegaskan bahwa transformasi media sosial telah mengubah pola partisipasi politik dan sosial generasi muda, sehingga menuntut pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih dialogis dan reflektif. Sejalan dengan itu, Adenya et al., (2025) menekankan bahwa pembelajaran PPKn perlu mengintegrasikan

strategi yang mendorong partisipasi aktif dan internalisasi nilai agar peserta didik mampu mengambil keputusan etis secara mandiri. Oleh karena itu, integrasi VCT dalam pembelajaran PPKn tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga strategis dalam memperkuat fungsi PPKn sebagai pendidikan nilai yang adaptif terhadap tantangan moral digital di era post-truth.

Value Clarification Technique (VCT) sebagai Strategi Integrasi Pendidikan Nilai Digital dalam PPKn

Value Clarification Technique (VCT) dipandang sebagai strategi pedagogis yang relevan untuk mengintegrasikan pendidikan nilai ke dalam pembelajaran PPKn di tengah tantangan krisis moral digital dan era post-truth. Berbeda dengan pendekatan pendidikan nilai yang bersifat indoktrinatif, VCT menekankan proses internalisasi nilai melalui tahapan memilih, menghargai, dan bertindak berdasarkan nilai yang diyakini secara sadar. Benaziria, (2018) menjelaskan bahwa VCT memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan reflektif dalam memahami nilai kewarganegaraan, sehingga lebih adaptif terhadap perubahan konteks sosial, termasuk lingkungan digital. Dalam konteks era post-truth, pendekatan ini menjadi semakin penting karena peserta didik dihadapkan pada situasi di mana kebenaran tidak selalu disajikan secara objektif, melainkan dibingkai oleh kepentingan, emosi, dan narasi manipulatif. Oleh karena itu, VCT tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran nilai, tetapi juga sebagai strategi pendidikan kewarganegaraan yang mendorong peserta didik untuk secara kritis menilai informasi digital dan mengambil keputusan moral yang bertanggung jawab. Dalam menghadapi maraknya misinformasi dan disinformasi di media sosial, Value Clarification Technique (VCT) menawarkan pendekatan pendidikan nilai yang menekankan proses dialogis dan reflektif.

Melalui diskusi dilema moral dan analisis kasus berbasis isu digital, peserta didik diajak untuk menilai berbagai alternatif nilai yang muncul dalam suatu peristiwa informasi, termasuk mempertimbangkan sumber, kepentingan, serta dampak sosial dari penyebaran informasi tersebut. Allcott & Gentzkow, (2017) menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu di media sosial sering kali dipicu oleh bias kognitif dan afiliasi kelompok, sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong kemampuan refleksi nilai dan pengambilan keputusan yang rasional. Pendekatan reflektif yang ditawarkan VCT sejalan dengan pandangan Fubini, (2019) yang menekankan pentingnya literasi kritis sebagai respons terhadap disinformasi digital. Dengan demikian, VCT berfungsi sebagai kerangka pedagogis yang membantu peserta didik tidak hanya mengenali informasi yang menyesatkan, tetapi juga mempertimbangkan implikasi moral dari sikap dan tindakan mereka dalam menyikapi informasi di ruang digital. Secara pedagogis, Value Clarification Technique (VCT) bekerja melalui tahapan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan klarifikasi nilai secara bertahap dan kontekstual, termasuk dalam menghadapi persoalan moral di ruang digital.

Tahap memilih mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi dan menimbang berbagai alternatif nilai yang muncul dalam suatu isu digital, seperti sikap terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau respons terhadap ujaran kebencian di media sosial. Tahap menghargai kemudian membantu peserta didik merefleksikan alasan di balik pilihan nilai yang diambil serta menguji konsistensinya dengan prinsip kewarganegaraan dan nilai Pancasila. Tahap terakhir, yaitu bertindak, menekankan implementasi nilai dalam bentuk sikap dan perilaku konkret di ruang digital. Hidayati & Minsih, (2023) bahwa tahapan reflektif dalam VCT berkontribusi pada pembentukan kesadaran moral yang lebih mendalam dibandingkan pendekatan normatif semata. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Nally, (2023) yang menyatakan bahwa pendidikan di era post-truth harus memberi ruang bagi peserta didik untuk memproses nilai secara kritis agar tidak mudah terjebak pada arus informasi yang manipulatif.

Dukungan empiris terhadap efektivitas Value Clarification Technique (VCT) dalam pembelajaran PPKn juga terlihat dalam berbagai penelitian mutakhir yang menekankan penguatan dimensi moral dan kewarganegaraan peserta didik. Hatmono et al., (2025) menunjukkan bahwa penerapan VCT dalam pembelajaran kewarganegaraan mampu meningkatkan pemahaman nilai multikultural dan sikap toleran peserta didik melalui proses refleksi dan dialog nilai yang terstruktur. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa VCT

efektif dalam membantu peserta didik mengaitkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan realitas sosial yang dihadapi, termasuk dalam konteks keberagaman dan konflik nilai. Selain itu, (Hidayati & Minsih, 2023) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis VCT mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pengambilan keputusan moral, sehingga nilai tidak sekadar dipahami secara kognitif, tetapi juga diinternalisasi secara afektif. Temuan-temuan ini menguatkan posisi VCT sebagai pendekatan pendidikan nilai yang relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn, khususnya dalam merespons tantangan krisis moral digital yang menuntut kemampuan refleksi dan tanggung jawab etis peserta didik.

Berdasarkan analisis konseptual dan dukungan empiris tersebut, Value Clarification Technique (VCT) dapat diposisikan sebagai strategi kunci dalam integrasi pendidikan nilai digital dalam pembelajaran PPKn. Karakteristik VCT yang menekankan klarifikasi nilai, dialog reflektif, dan pengambilan keputusan moral secara sadar menjadikannya relevan untuk membekali peserta didik dalam menghadapi kompleksitas moral di era post-truth. Ghosh, (2022) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tengah melemahnya rasionalitas publik perlu mengembangkan kemampuan evaluatif dan tanggung jawab moral warga negara secara berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Nally, (2023) menyatakan bahwa pendidikan yang responsif terhadap era post-truth harus mendorong peserta didik untuk tidak sekadar menerima informasi, tetapi juga merefleksikan nilai yang melandasi sikap dan tindakan mereka. Dengan demikian, integrasi VCT dalam pembelajaran PPKn tidak hanya berkontribusi pada penguatan pendidikan nilai, tetapi juga menjadi fondasi konseptual bagi pengembangan literasi moral digital peserta didik sebagai warga negara di era digital.

Penguatan Literasi Moral Digital Peserta Didik melalui Integrasi VCT dalam Pembelajaran PPKn

Penguatan literasi moral digital menjadi kebutuhan mendesak dalam pembelajaran PPKn seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi peserta didik di ruang digital yang sarat dengan misinformasi, disinformasi, dan polarisasi nilai. Literasi moral digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan peserta didik untuk menilai, merefleksikan, dan menginternalisasi nilai moral dalam setiap praktik komunikasi dan partisipasi digital. Khairunisa et al., (2024) menegaskan bahwa pembangunan keadaban digital warga negara Indonesia memerlukan integrasi pendidikan nilai yang secara eksplisit diarahkan pada pembentukan kesadaran etis di ruang digital. Dalam konteks ini, integrasi Value Clarification Technique (VCT) dalam pembelajaran PPKn memberikan kerangka pedagogis yang memungkinkan peserta didik mengembangkan literasi moral digital melalui proses klarifikasi nilai, dialog reflektif, dan pengambilan keputusan moral yang bertanggung jawab. Dengan demikian, VCT berperan sebagai jembatan antara pendidikan nilai kewarganegaraan dan tuntutan kompetensi moral peserta didik dalam menghadapi dinamika kehidupan digital di era post-truth. Dalam konteks era post-truth, penguatan literasi moral digital menjadi semakin krusial karena peserta didik dihadapkan pada situasi di mana batas antara fakta, opini, dan manipulasi informasi semakin kabur.

Era post-truth tidak hanya memengaruhi cara individu mengonsumsi informasi, tetapi juga membentuk pola sikap dan keputusan moral dalam ruang publik digital. Nally, (2023) menegaskan bahwa pendidikan di era post-truth perlu diarahkan pada penguatan kesadaran reflektif agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh narasi emosional dan kepentingan ideologis tertentu. Pandangan tersebut sejalan dengan Frankfurt, (2005) yang mengkritik fenomena pengabaian kebenaran sebagai ancaman serius bagi kehidupan publik dan etika sosial. Dalam situasi demikian, literasi moral digital melalui pembelajaran PPKn berbasis Value Clarification Technique (VCT) berfungsi untuk membantu peserta didik memahami konsekuensi moral dari setiap tindakan digital, termasuk dalam menyikapi informasi, berkomunikasi di media sosial, dan berpartisipasi dalam diskursus publik secara bertanggung jawab. Sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pembentukan warga negara, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan peserta didik sebagai warga negara digital yang bermoral dan bertanggung jawab.

Di era digital, peran PPKn tidak lagi terbatas pada penanaman pengetahuan normatif tentang negara dan hukum, tetapi juga mencakup pembentukan sikap etis dalam berinteraksi di ruang publik digital. Rokhmanuk

& Goncharenko, (2023) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi agar tetap relevan dalam membentuk partisipasi warga negara yang beretika. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan tersebut semakin mendesak mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Karo & Afriani, (2024) menunjukkan bahwa transformasi media sosial telah memengaruhi pola partisipasi sosial dan politik generasi Z, sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu mengintegrasikan dimensi literasi moral digital secara sistematis. Melalui integrasi Value Clarification Technique (VCT), pembelajaran PPKn dapat memfasilitasi peserta didik untuk merefleksikan nilai kewarganegaraan dalam konteks digital, sehingga terbentuk kesadaran moral yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Secara pedagogis, integrasi Value Clarification Technique (VCT) dalam pembelajaran PPKn memberikan implikasi penting terhadap penguatan literasi moral digital peserta didik.

Pembelajaran berbasis VCT memungkinkan guru menghadirkan isu-isu aktual di ruang digital seperti hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini sebagai bahan refleksi nilai yang kontekstual dan bermakna. Adenya et al., (2025) menekankan bahwa pembelajaran PPKn yang mendorong partisipasi aktif dan dialog nilai berkontribusi pada internalisasi karakter kewarganegaraan peserta didik secara lebih mendalam. Pendekatan dialogis tersebut sejalan dengan pandangan Barzilai & Chinn, (2020) yang menyatakan bahwa respons pendidikan terhadap era post-truth harus menekankan proses penalaran, evaluasi bukti, dan refleksi nilai secara berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan VCT dalam PPKn tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana pedagogis untuk membentuk kebiasaan berpikir etis dan bertanggung jawab dalam menghadapi informasi dan interaksi di ruang digital.

Secara keseluruhan, penguatan literasi moral digital peserta didik melalui integrasi Value Clarification Technique (VCT) dalam pembelajaran PPKn merupakan respons konseptual yang relevan terhadap tantangan krisis moral digital di era post-truth. Karakteristik VCT yang menekankan klarifikasi nilai, refleksi kritis, dan pengambilan keputusan moral secara sadar memungkinkan peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks kehidupan digital yang kompleks. Ghosh, (2022) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tengah dinamika post-truth harus diarahkan pada pembentukan warga negara yang mampu menilai informasi secara kritis dan bertindak berdasarkan pertimbangan etis. Pandangan ini sejalan dengan Frankfurt, (2005) yang menyoroti pentingnya komitmen terhadap kebenaran sebagai fondasi etika kehidupan publik. Dengan demikian, integrasi VCT dalam pembelajaran PPKn tidak hanya berkontribusi pada penguatan pendidikan nilai, tetapi juga memperkaya diskursus akademik mengenai pengembangan literasi moral digital sebagai kompetensi esensial warga negara di era digital.

KESIMPULAN

Krisis moral digital pada peserta didik merupakan persoalan kewarganegaraan kontemporer yang ditandai oleh paparan misinformasi, disinformasi, dan polarisasi nilai di ruang digital, yang diperkuat oleh dinamika era post-truth. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji secara konseptual integrasi pendidikan nilai dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai respons terhadap tantangan tersebut. Temuan konseptual utama menunjukkan bahwa Value Clarification Technique (VCT) memiliki peran strategis sebagai model pembelajaran yang memungkinkan integrasi nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam konteks kehidupan digital secara reflektif dan kontekstual. Integrasi VCT dalam PPKn diwujudkan melalui proses klarifikasi nilai, dialog moral, dan pengambilan keputusan etis yang diarahkan pada isu-isu aktual di ruang digital, sehingga berkontribusi pada penguatan literasi moral digital peserta didik. Literasi moral digital dalam kajian ini dipahami sebagai kemampuan peserta didik untuk memahami, menilai, dan menginternalisasi nilai moral dalam praktik komunikasi dan partisipasi digital sebagai warga negara. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan desain pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan VCT sebagai strategi pendidikan nilai yang adaptif terhadap tantangan moral digital. Sementara itu, arah kajian lanjutan dapat difokuskan pada pengujian empiris penerapan

VCT dalam pembelajaran PPKn, pengembangan instrumen literasi moral digital, serta eksplorasi integrasi VCT dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di era digital.

REFERENSI

- Adenya, A. G., Anggraini, R., & Sari, D. A. (2025). Pengembangan Media Pembelajaran Amplop Misterius Pada Pembelajaran Ppkn Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 314–325.
<https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i6.344>
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media And Fake News In The 2016 Election. *Journal Of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236.
- Amir, R. U., Putri, A. R., Zaini, S. N., & Batubara, T. (2025). Pendidikan Pancasila Dan Ketahanan Informasi Di Era Post-Truth. *Polyscopia*, 2(1), 34–41.
- Barzilai, S., & Chinn, C. A. (2020b). A Review Of Educational Responses To The “Post-Truth” Condition: Four Lenses On “Post-Truth” Problems. *Educational Psychologist*, 55(3), 107–119.
<https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1786388>
- Benaziria, B. (2018). Pengembangan Literasi Digital Pada Warga Negara Muda Dalam Pembelajaran Ppkn Melalui Model VCT. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 11–20.
- Frankfurt, H. G. (2005). *On Bullshit*. Princeton University Press.
- Fubini, A. (2019). Fake News And Disinformation Online. *Problemi Dell'informazione*, 44(1), 243–250.
- Ghosh, B. (2022). Politics Of Manufacturing Consent In A Post-Truth Society. *Journal Of Developing Societies*, 38(1), 7–26.
- Hatmono, P. D., Sutimin, L. A., Akhyar, M., & Djono. (2025). Effectiveness Of Value Clarification Technique (VCT) Based Teaching Materials On High School Students' Understanding Of Multiculturalism: Mixed Method Approach. *Educational Process: International Journal*, 15.
<https://doi.org/10.22521/Edupij.2025.15.157>
- Hidayati, B. N., & Minsih. (2023). The Value Clarification Technique Learning Model Improves The Character Of Elementary School Students. *International Journal Of Elementary Education*, 7(2), 319–327.
<https://doi.org/10.23887/Ijee.v7i2.58502>
- Isabella, Iriyani, A., & Lestari, D. P. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 167–172.
- Karo, S. M., & Afriani, F. (2024). Transformasi Media Sosial Dan Pendidikan Politik Pada Generasi Z. *Temu Ilmiah Nasional Guru XVI*, 16(November), 41–52.
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 1–8.
- Khasanah, R. S. (2017). Pengaruh Penerapan Metode VCT (Value Clarification Technique) Terhadap Peningkatan Partisipasi Dan Hasil Belajar Pkn. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 56–65.
<https://doi.org/10.21831/Socia.V14i1.15952>
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2019). *Children's Data And Privacy Online: Growing Up In A Digital Age* (Issue January). London School Of Economics And Political Science (LSE).
- Nally, D. (2023). Post-Truth, Education And Dissent. *Educational Philosophy And Theory*, 55(5), 609–621.
- Oxford English, D. (N.D.). *Post-Truth*. Oxford University Press.
- Rahmat, A. (2023). *Bersaing Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Masyarakat 5.0*. Yayasan Haqqi Internasional Edukasi.
- Rizki, A., Rangga, A. H., & Indriani, R. (2021). *Status Literasi Digital Di Indonesia: Ringkasan Eksekutif*.

594 *Integrasi Pendidikan Nilai dalam PPKn Melalui Model Value Clarification Technique (VCT) untuk Mengatasi Krisis Moral Digital pada Peserta Didik – Suratih Muhamad Karo, Juliana Rohima Putri*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i2.10482>

Rokhmanuk, H., & Goncharenko, S. (2023). Innovations And Education. *Grail Of Science*, 28, 406–407.

Tobergte, D. R., & Curtis, S. (2013). Reuters Institute Digital News Report. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Wijaya, S. H. B. (2020). Literasi Media Sosial Dalam Fatwa Keagamaan (Studi Deskriptif Fungsi Komunikasi Sosial Majelis Ulama Indonesia Atas Fatwa Keagamaan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Literasi Media Sosial). *Jurnal Impresi*, 1(April), 39–50.